

REAKSI SULTAN THAHA SYAIFUDDIN TERHADAP PENETRASI KOLONIAL BELANDA DI JAMBI 1858-1904

Muhammad Akmal Luddin, Achmad Sani Rosyid , Hadi Waluyo

Universitas Jambi

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2025

Revised November 2025

Accepted November 2025

Available online November 2025

Email:

muhammadakma2019@gmail.com,

achmadsanirosyid@gmail.com,

hadiwaluyo.2024@student.uny.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Abtrak

Kesultanan Jambi pada pertengahan abad ke-19 menghadapi tekanan politik, ekonomi, dan militer dari Belanda yang berupaya menguasai wilayah tersebut melalui kontrak politik, pengangkatan sultan boneka, dan strategi pecah belah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses penetrasi kolonial Belanda di Jambi serta menganalisis reaksi Sultan Thaha Syaifuddin dalam mempertahankan kedaulatan kesultanan pada periode 1858-1904. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis yang meliputi tahapan heuristik untuk pengumpulan sumber primer dan sekunder, kritik sumber internal dan eksternal untuk menilai keaslian dan kredibilitas data, interpretasi untuk mengaitkan fakta-fakta sejarah, serta historiografi untuk menyusun narasi yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaksi Sultan Thaha Syaifuddin mencakup penolakan tegas terhadap kontrak politik kolonial, penolakan terhadap pengangkatan sultan boneka, strategi perang gerilya yang efektif di pedalaman, konsolidasi dukungan rakyat, serta upaya diplomasi dengan pihak luar untuk mempertahankan kedaulatan Jambi. Perlawanan yang berlangsung lebih dari empat dekade ini berakhir dengan gugurnya Sultan Thaha pada tahun 1904, namun perjuangannya memberikan inspirasi dan kontribusi penting bagi semangat kebangsaan dan perlawanan nasional di kemudian hari.

Kata Kunci : Sultan Thaha Syaifuddin, Kesultanan Jambi, Kolonialisme Belanda, Perang Gerilya, Perlawanan Anti-Kolonial.

a b s t r a c t

The Sultanate of Jambi in the mid-19th century faced political, economic, and military pressures from the Dutch, who sought to dominate the region through political contracts, the appointment of puppet sultans, and divide-and-rule strategies. The purpose of this study is to describe the process of Dutch colonial penetration in Jambi and to analyze Sultan Thaha Syaifuddin's reaction in defending the sovereignty of the sultanate during the period 1858-1904. The method used is qualitative research with a historical approach, which includes heuristic stages for collecting primary and secondary sources, internal and external source criticism to assess the authenticity and credibility of data, interpretation to connect historical facts, and historiography to construct a systematic narrative. The results of the study show that Sultan Thaha Syaifuddin's reaction included a firm rejection of colonial political contracts, opposition to the appointment of puppet sultans, the implementation of effective guerrilla warfare strategies in the hinterlands, consolidation of popular support, and diplomatic efforts with external parties to maintain Jambi's sovereignty. The resistance, which lasted for more than four decades, ended with the death of Sultan Thaha in 1904; however, his struggle provided inspiration and made a significant contribution to the spirit of nationalism and future anti-colonial movements.

Keywords: Sultan Thaha Syaifuddin, Sultanate of Jambi, Dutch Colonialism, Guerrilla Warfare, Anti-Colonial Resistance.

PENDAHULUAN

Di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Kahar (1615-1643 M), Kesultanan Melayu Jambi sempat menerima kunjungan dua kapal dagang Belanda yang kemudian diberi izin mendirikan kantor perusahaan pada 1616 M untuk mengelola perdagangan lada dan hasil hutan (Indonesia, 2008). Namun, pada 1623 M loji dagang tersebut ditutup karena Belanda gagal membangun hubungan baik dengan masyarakat lokal (Rizka, A., & Seprina, 2023). Upaya Belanda untuk memonopoli perdagangan dan menguasai wilayah justru memicu perlawanan, terutama karena mayoritas penduduk Jambi adalah Muslim taat yang menolak intervensi asing yang bertentangan

dengan nilai-nilai Islam. Selain faktor perbedaan agama, perlawanan juga dipicu oleh campur tangan Belanda dalam pemerintahan serta praktik dagang yang dianggap sewenang-wenang. Perjuangan melawan dominasi Belanda digalang oleh para Sultan dan pejuang Jambi sebagai bentuk perlawanan kolektif demi mempertahankan kedaulatan (Masjkuri, 1985).

Pada periode 1643-1665 M, Kesultanan Jambi dipimpin Sultan Agung Abdul Jalil, lalu dilanjutkan Sultan Sri Ingologo (1665-1690 M) yang masa pemerintahannya diwarnai ketegangan dengan Belanda hingga memuncak pada 1690 M dengan terbunuhnya kepala kantor VOC, Syabrandelt Swart. Setelahnya, tampuk kekuasaan beralih kepada Sultan Kiyai Gede, Sultan Mahmud Syah, Sultan Istra Ingologo, Sultan Mas'ud Badaruddin, hingga Sultan Agung Sri Ingologo Alamsyah (1812-1833 M) yang sempat mengirim prajurit membantu Sultan Palembang melawan Belanda (Rts, 2022). Namun, pada masa Sultan Muhammad Fachruddin (pengganti pada 1833 M), bajak laut sempat merebut kekuasaan Jambi dan diusir dengan bantuan Belanda, yang kemudian memanfaatkan situasi untuk menguasai Jambi. Hal ini memicu kemarahan Sultan Fachruddin sehingga ia melawan Belanda di Rawas, tetapi akhirnya terkepung oleh pasukan Letnan Kolonel Michiels. Akibat penaklukan tersebut, ekonomi Jambi merosot tajam dan Sultan dipaksa menandatangani Korte Verklaring pada 14 November 1833. Seusai wafatnya Sultan Fachruddin (1841 M), Pangeran Ratu Abdurrahman Nazaruddin naik tahta dan menerima perjanjian dengan Belanda tanpa perlawanan demi mencegah konflik, meski rakyat tetap melakukan perlawanan sengit terhadap kolonialisme yang terus berusaha menancapkan dominasi di Kesultanan Jambi.

Raden Thaha Ningrat yang kemudian bergelar Sultan Thaha Saifuddin dibesarkan di istana dan dikenal sebagai pemimpin berani, bijaksana, serta strategis sejak muda. Ia aktif mengunjungi desa-desa, memberi ceramah Jumat, dan menggerakkan rakyat membangun benteng untuk melawan Belanda (Yulita, 2019). Perjalanannya ke Aceh memperkaya wawasan agama, politik, dan militernya, sehingga ia mampu membentuk pasukan Sabilillah dan pasukan komando. Setelah pamannya, Sultan Abdurrahman Nazaruddin, wafat pada 1855 M, ia naik tahta, mencabut semua perjanjian yang menguntungkan Belanda, dan menyatakan perlawanan terbuka pada 1856 M. Tindakan ini membuat Belanda marah dan meningkatkan agresi mereka, terutama setelah mengetahui Sultan menjalin komunikasi diplomatik dengan Sultan Turki Abdul Majid I guna menolak campur tangan asing dalam urusan Jambi.

Penetrasi merupakan proses masuknya pengaruh atau kekuatan secara bertahap, baik langsung maupun tidak langsung, ke dalam suatu wilayah atau sistem, dan dalam konteks kolonialisme digunakan penjajah untuk memperluas kekuasaan melalui intervensi politik, dominasi ekonomi, kontrol militer, hingga pengaruh budaya. Tujuan utamanya adalah menguasai sumber daya, memperluas wilayah, meraih keuntungan ekonomi, serta menanamkan sistem sesuai kepentingan kolonial. Dalam sejarah Jambi, Belanda awalnya melakukan penetrasi secara halus, namun berkembang menjadi dominasi memaksa yang memicu perlawanan Sultan Thaha Saifuddin. Masyarakat Jambi memboikot perdagangan hasil pertanian dan kayu dengan Belanda sehingga kantor dagang di Muaro Kumpoh terpaksa ditutup, sementara Sultan Thaha menolak segala perjanjian baru yang menguntungkan Belanda. Kesetiaan rakyat terhadap Sultan begitu besar melalui ikrar "Setih Setio," yang memperkuat perlawanan mereka terhadap penjajah. Karena kesulitan menundukkan Sultan, Belanda akhirnya meminta nasihat Dr. Snouck Hurgronje untuk menyusun strategi penaklukan Jambi.

Perlawanan Sultan Thaha Saifuddin terhadap Belanda (1855-1904) dikenal melalui taktik perang gerilya yang membuat musuh kesulitan menghadapi serangan, disertai strategi diplomasi dengan Turki, Inggris, dan Amerika Serikat untuk menolak dominasi kolonial (Vernanda, E. A., & Zahrah, 2006). Meskipun Belanda secara resmi mencabut pengakuan terhadapnya pada 1858, Sultan Thaha tetap memimpin perlawanan hingga gugur di Muara Tebo pada 1904 tanpa pernah tertangkap. Perjuangannya yang menggabungkan kekuatan militer, penolakan monopoli

ekonomi, serta dukungan rakyat melalui ikrar “Setih Setio” menunjukkan keteguhan mempertahankan kedaulatan Jambi (Rosyadi, 2023). Penelitian ini penting untuk menggali kembali narasi sejarah lokal dan memperkaya pemahaman tentang strategi perlawanan kolonial yang tidak hanya bersifat militeristik, tetapi juga sarat kecerdasan politik dan diplomasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kolonialisme Belanda di Kesultanan Jambi pada masa kepemimpinan Sultan Thaha Syaifuddin. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan secara rinci proses penetrasi kolonial yang dilakukan Belanda pada periode 1858-1904, termasuk strategi politik, ekonomi, militer, dan sosial yang mereka gunakan untuk memperluas dominasi di wilayah Jambi. Penelitian ini bertujuan mengungkap secara mendalam reaksi Sultan Thaha Syaifuddin terhadap upaya penetrasi tersebut, baik melalui perlawanan bersenjata seperti perang gerilya, strategi diplomatik dengan negara asing, maupun dukungan moral dan spiritual yang diperkuat dengan ikrar kesetiaan rakyat Jambi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian sejarah lokal dan memberikan gambaran utuh tentang keteguhan Sultan Thaha dalam mempertahankan kedaulatan Jambi sekaligus relevansinya bagi pemahaman perjuangan anti-kolonialisme di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis, yang dirancang untuk menelusuri, memahami, dan menganalisis secara mendalam peristiwa sejarah mengenai penetrasi kolonial Belanda dan reaksi Sultan Thaha Saifuddin di Jambi pada periode 1858-1904. Pendekatan historis ini mencakup empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan untuk mengumpulkan data dari sumber primer seperti arsip, manuskrip, wawancara, atau kesaksian saksi sejarah, serta sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan naskah akademik yang relevan. Setelah data terkumpul, dilakukan kritik sumber baik secara internal maupun eksternal untuk menilai keaslian, validitas, serta reliabilitas data yang digunakan. Kritik internal memeriksa isi dan kredibilitas informasi, sedangkan kritik eksternal menelaah keaslian fisik sumber, seperti bahan, tulisan, atau media penulisan yang digunakan pada zamannya. Proses ini memastikan bahwa data yang dipakai benar-benar sahih dan bebas dari pemalsuan atau bias yang dapat mengaburkan fakta sejarah.

Tahap berikutnya adalah interpretasi, di mana data yang telah teruji keasliannya dianalisis dan dihubungkan untuk menemukan keterkaitan serta makna yang relevan dengan rumusan masalah. Pada tahap ini, peneliti menyusun kerangka pemikiran yang koheren dengan menyatukan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap strategi perlawanan Sultan Thaha Saifuddin, baik melalui perang gerilya maupun upaya diplomatik. Tahap terakhir adalah historiografi, yakni penulisan sejarah yang sistematis berdasarkan data yang telah dianalisis, sehingga menghasilkan rekonstruksi peristiwa yang akurat dan kronologis. Hasil dari keseluruhan proses tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Reaksi Sultan Thaha Saifuddin Terhadap Penetrasi Kolonial Belanda di Jambi 1858-1904,” sehingga mampu memberikan kontribusi akademik yang bermakna sekaligus memperkaya narasi sejarah lokal mengenai perjuangan anti-kolonialisme di Nusantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Penetrasi (Masuk dan Campur Tangan) Kolonial Belanda Terhadap Sultan Thaha Syaifuddin di Jambi Pada Tahun 1858-1904

Pada pertengahan abad ke-19, Kesultanan Jambi menjadi salah satu titik strategis yang menarik perhatian pemerintah kolonial Belanda. Letak geografisnya di pesisir timur Sumatera, yang memiliki akses langsung ke Selat Malaka dan menjadi pintu perdagangan internasional, menjadikan Jambi sebagai wilayah penting baik secara ekonomi maupun politik (Apriliani, R., & Seprina, 2023). Kawasan ini kaya akan hasil bumi seperti lada, karet, damar, rotan, dan komoditas hutan lainnya yang memiliki nilai jual tinggi di pasar global. Belanda, yang saat itu sedang giat memperluas wilayah kekuasaannya setelah menundukkan Perang Paderi di Sumatera Barat dan mulai memasuki Perang Aceh, melihat Jambi sebagai mata rantai penting dalam upaya menguasai Sumatera secara keseluruhan (Yulita, 2019). Menguasai Jambi berarti mengamankan jalur perdagangan yang menghubungkan pedalaman Sumatera dengan pasar internasional sekaligus menghalangi penetrasi kekuatan kolonial lain seperti Inggris.

Proses masuknya Belanda ke Jambi tidak dilakukan secara frontal sejak awal. Mereka memulai dengan pendekatan diplomatik dan politik, menawarkan perjanjian-perjanjian yang tampaknya bersifat kerja sama namun sarat pasal yang menguntungkan pihak kolonial. Kontrak-kontrak tersebut mencakup pengendalian perdagangan, perpajakan, hingga kebijakan luar negeri Jambi. Namun, Sultan Thaha Syaifuddin yang diangkat setelah wafatnya Sultan Abdul Rahman, menolak menandatangani kontrak politik yang dianggap merugikan kedaulatan kesultanan. Bagi Sultan Thaha, menerima perjanjian semacam itu sama dengan menyerahkan Jambi kepada penjajah. Sikap tegas ini menandai titik awal konflik berkepanjangan antara Kesultanan Jambi dan Belanda (Masjkuri, 1985).

Penolakan Sultan Thaha memicu respons keras dari pihak kolonial. Belanda mencabut pengakuan atas kekuasaannya dan menunjuk seorang sultan lain yang bersedia tunduk pada perjanjian tersebut. Tindakan ini menciptakan dualisme kekuasaan di Jambi, di mana sebagian bangsawan mendukung sultan yang diangkat Belanda, sementara sebagian lainnya tetap setia kepada Sultan Thaha. Perpecahan internal ini secara perlahan melemahkan kesatuan politik Kesultanan Jambi dan membuka celah bagi Belanda untuk memperkuat pengaruhnya. Strategi pecah belah (*divide et impera*) dijalankan dengan cermat: Belanda memberikan dukungan militer, logistik, dan fasilitas kepada kelompok bangsawan yang pro-kolonial, sehingga posisi Sultan Thaha semakin terdesak.

Sultan Thaha tetap mempertahankan legitimasinya di mata rakyat. Ia memimpin perlawanan dari pedalaman Jambi dengan taktik perang gerilya yang membuat Belanda kewalahan. Perang gerilya ini menimbulkan kesan bahwa pasukan Sultan Thaha berada di banyak tempat sekaligus, sehingga memaksa Belanda mengerahkan sumber daya besar untuk melacak pergerakan lawannya (Junaidi, 2007). Perlawanan Sultan Thaha tidak hanya bersifat militer, tetapi juga diplomatik. Ia menjalin komunikasi dengan tokoh adat, ulama, dan masyarakat pedalaman untuk memperkuat basis dukungan. Bahkan, Sultan Thaha berupaya menjalin hubungan dengan negara-negara lain seperti Turki Utsmani, Inggris, dan Amerika Serikat untuk mencari dukungan politik dan militer demi mempertahankan kedaulatan Jambi.

Motif ekonomi menjadi pendorong utama penetrasi Belanda. Penguasaan atas Jambi memberikan Belanda akses penuh terhadap komoditas yang sangat berharga. Jalur Sungai Batanghari yang menghubungkan pedalaman dengan pesisir menjadi fokus utama pengendalian, karena melalui jalur inilah hasil bumi diangkut menuju pelabuhan untuk diekspor ke pasar global. Setelah melemahkan posisi Sultan Thaha melalui pengangkatan sultan boneka dan penempatan pasukan militer, Belanda mulai membuka perkebunan-perkebunan baru, memperkuat jaringan perdagangan, dan memaksakan sistem kerja paksa yang merugikan rakyat. Tanah-tanah adat diambil alih, masyarakat lokal dipaksa bekerja untuk kepentingan

kolonial, dan hasil produksi sebagian besar diekspor untuk memenuhi kebutuhan ekonomi metropolitan kolonial di Eropa.

Kepentingan geopolitik turut memperkuat ambisi Belanda. Dengan menguasai Jambi, Belanda dapat menutup akses pesaing kolonial lain terhadap jalur perdagangan di Selat Malaka. Hal ini penting mengingat pada masa itu Inggris juga sedang aktif memperluas pengaruhnya di Semenanjung Malaya dan Singapura. Kontrol atas Jambi memastikan dominasi Belanda atas jalur logistik dan mencegah kebocoran komoditas ke tangan negara pesaing. Posisi strategis Jambi membuat Belanda terus meningkatkan operasi militer dan pembangunan infrastruktur, termasuk pendirian benteng, pos penjagaan, dan penguatan pelabuhan, demi menjaga kelancaran arus perdagangan dan menekan potensi perlawanan lokal.

Perlawanan Sultan Thaha menjadi ancaman serius bagi stabilitas pemerintahan kolonial. Belanda khawatir perlawanan berkepanjangan di Jambi akan menjadi inspirasi bagi daerah lain yang juga memiliki sentimen anti-kolonial. Oleh sebab itu, mereka meningkatkan operasi militer secara besar-besaran, mengerahkan pasukan dengan perlengkapan tempur lengkap, dan menggunakan strategi politik adu domba untuk memecah kekuatan pendukung Sultan Thaha. Namun, taktik represif ini tidak serta-merta memadamkan semangat perlawanan. Sultan Thaha tetap mengandalkan dukungan rakyat pedalaman, yang setia melalui ikrar “Setih Setio” untuk melindungi kesultanan dari penjajahan. Dukungan moral dan spiritual ini menjadi kekuatan penting yang membuat perlawanan Sultan Thaha bertahan selama hampir setengah abad.

Transformasi pendekatan Belanda dari diplomasi ke pendudukan militer menandai berakhirnya masa negosiasi dan awal dari penjajahan langsung. Pendekatan militer yang sistematis dilakukan dengan membangun benteng, menangkap tokoh-tokoh penting, dan menekan masyarakat agar tunduk. Namun, Sultan Thaha tetap konsisten melawan. Strategi gerilya yang ia terapkan memperlambat proses penguasaan penuh oleh Belanda, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk mempertahankan pasukan dan logistik di wilayah Jambi (Yulita, 2019).

Perpecahan internal di tubuh istana turut mempercepat penetrasi Belanda. Konflik antara keluarga bangsawan dan elite adat menciptakan ketidakstabilan politik yang dimanfaatkan Belanda. Beberapa pihak tergoda oleh janji jabatan, harta, atau fasilitas yang ditawarkan Belanda, sehingga bersedia bekerja sama dengan pihak kolonial. Perpecahan ini melemahkan koordinasi militer dan membuat perjuangan kehilangan kesatuan komando. Meskipun demikian, Sultan Thaha terus mempertahankan perlawanan dengan kekuatan yang tersisa hingga akhirnya gugur pada tahun 1904 di Muara Tebo (Vernanda, E. A., & Zahrah, 2006). Gugurnya Sultan Thaha menandai berakhirnya perlawanan besar di Jambi dan sekaligus melengkapi proyek ekspansi Belanda di Sumatera. Dengan jatuhnya Jambi, Belanda berhasil menyatukan hampir seluruh Sumatera ke dalam sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Namun, warisan perjuangan Sultan Thaha tetap hidup. Ia diakui sebagai pahlawan nasional karena keteguhannya menolak penjajahan dan mempertahankan kedaulatan bangsanya. Namanya diabadikan menjadi nama bandara dan jalan utama di Jambi, sebagai simbol keberanian dan pengingat bahwa kedaulatan tidak boleh dikompromikan.

Keseluruhan proses penetrasi Belanda di Jambi memperlihatkan bahwa kolonialisme bukan hanya terjadi melalui perang terbuka, tetapi juga melalui strategi politik, ekonomi, dan sosial yang sistematis. Penolakan Sultan Thaha terhadap kontrak politik, perjuangannya memimpin perang gerilya, hingga dukungan rakyat pedalaman menjadi bukti nyata bahwa perjuangan melawan penjajahan memerlukan keberanian, keteguhan prinsip, dan kesatuan. Meskipun akhirnya Belanda berhasil menguasai Jambi, perjuangan ini menjadi inspirasi bagi gerakan nasional di kemudian hari. Semangat Sultan Thaha menjadi teladan bahwa kedaulatan dan martabat bangsa harus diperjuangkan, meskipun harus dibayar dengan pengorbanan jiwa dan raga.

2. Reaksi Sulthan Thaha Syarifudin Terhadap Penetrasi Kolonial Belanda di Jambi 1858-1904

Reaksi Sultan Thaha Syaifuddin terhadap penetrasi kolonial Belanda merupakan salah satu episode penting dalam sejarah perlawanan anti-kolonial di Nusantara. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda telah memperkuat kekuasaannya di sebagian besar wilayah Sumatera, terutama setelah Perang Paderi berakhir dan Perang Aceh mulai digencarkan. Kesultanan Jambi yang berada di pesisir timur Sumatera menjadi sasaran berikutnya karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan internasional serta kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah (Indonesia, 2008). Penetrasi Belanda ke Jambi awalnya dilakukan melalui pendekatan diplomatik, yakni dengan menawarkan kontrak politik yang dimaksudkan untuk mengikat Jambi ke dalam sistem pemerintahan kolonial. Namun, Sultan Thaha Syaifuddin menunjukkan sikap tegas dengan menolak menandatangani kontrak tersebut karena dianggap merugikan kedaulatan Jambi. Penolakan ini menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan, menandai dimulainya perlawanan terbuka terhadap kolonialisme.

Salah satu bentuk reaksi paling awal yang ditunjukkan Sultan Thaha adalah penolakannya terhadap perjanjian politik yang diajukan oleh Belanda. Dalam pandangannya, kontrak tersebut bukanlah kerja sama yang sejajar, melainkan upaya untuk menjadikan Jambi sebagai wilayah yang tunduk pada pemerintahan kolonial. Isi perjanjian mencakup pengaturan perdagangan, pengendalian pajak, serta pengawasan atas urusan luar negeri kesultanan, yang secara langsung mengurangi kedaulatan politik. Sultan Thaha menyadari bahwa menerima perjanjian itu berarti mengorbankan kemerdekaan Jambi dan menempatkannya di bawah kendali Belanda. Keputusannya untuk menolak menandatangani kontrak politik ini merupakan langkah berani yang memperlihatkan kesadaran politik yang tinggi. Sikap ini juga menjadi simbol penegakan martabat bangsa, bahwa Jambi bukan wilayah yang bisa dikendalikan hanya dengan selembar perjanjian.

Penolakan Sultan Thaha memicu perubahan strategi Belanda dari pendekatan diplomatik menjadi militeristik. Setelah kontrak politik gagal dipaksakan, Belanda mencabut pengakuan terhadap kekuasaan Sultan Thaha dan mengangkat sultan boneka yang bersedia tunduk pada perjanjian. Langkah ini menciptakan dualisme kekuasaan di Jambi dan memecah persatuan politik di kalangan bangsawan (Sianipar, 2022). Sebagian kelompok menerima kekuasaan sultan boneka karena alasan pragmatis, sementara yang lain tetap setia kepada Sultan Thaha. Perpecahan ini menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Sultan Thaha dalam mempertahankan perlawanan. Meskipun demikian, ia tetap mengklaim dirinya sebagai sultan sah di mata rakyat dan menolak mengakui penguasa yang diangkat oleh Belanda. Tindakan ini menunjukkan keteguhan prinsip bahwa kekuasaan sejati datang dari legitimasi adat dan dukungan rakyat, bukan dari pengakuan penjajah.

Setelah kehilangan kekuasaan formal di ibu kota, Sultan Thaha mundur ke pedalaman dan mengubah strategi perlawanan menjadi perang gerilya. Reaksi ini sangat tepat mengingat kondisi geografis Jambi yang didominasi hutan lebat dan sungai-sungai yang sulit dijangkau pasukan kolonial. Perang gerilya memungkinkan Sultan Thaha dan pasukannya melakukan serangan mendadak terhadap pos-pos militer Belanda, menghancurkan jalur logistik, dan kemudian menghilang sebelum pasukan kolonial bisa melakukan serangan balasan (Rts, 2022). Strategi ini membuat Belanda kewalahan karena perang konvensional mereka tidak efektif menghadapi musuh yang bergerak cepat dan tidak memiliki pusat kekuasaan tetap. Perang gerilya ini juga memberikan efek psikologis yang besar, membuat Belanda merasa tidak pernah benar-benar aman meskipun telah menguasai ibu kota.

Sultan Thaha menunjukkan kemampuan organisasi yang luar biasa. Ia membangun jaringan komunikasi dengan tokoh adat, ulama, dan kepala dusun di berbagai wilayah pedalaman untuk memastikan bahwa perjuangan terus berlanjut. Rakyat pedalaman menjadi tulang punggung perlawanan dengan menyediakan logistik, informasi, dan tempat perlindungan bagi Sultan dan

masukannya. Dukungan ini bukan hanya bersifat praktis, tetapi juga moral, karena rakyat melihat Sultan Thaha sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan. Solidaritas antara pemimpin dan rakyat inilah yang memungkinkan perlawanan bertahan selama hampir setengah abad. Reaksi Sultan Thaha yang melibatkan partisipasi rakyat ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan kolonialisme bukan hanya urusan elit politik, tetapi juga gerakan kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Sultan Thaha juga mengembangkan strategi diplomatik. Ia berusaha menjalin hubungan dengan negara-negara lain seperti Turki Utsmani, Inggris, dan bahkan Amerika Serikat, dengan tujuan mencari dukungan politik dan militer. Langkah ini menunjukkan wawasan global Sultan Thaha, yang menyadari bahwa perjuangan melawan kolonialisme memerlukan jaringan internasional. Diplomasi yang dijalankannya juga bertujuan untuk mengirim pesan kepada Belanda bahwa Jambi bukan wilayah yang bisa ditaklukkan begitu saja tanpa perlawanan dan bahwa sultan memiliki legitimasi politik yang diakui oleh pihak luar. Reaksi diplomatik ini merupakan bagian penting dari upaya mempertahankan kedaulatan di tengah tekanan kolonial.

Sultan Thaha juga bereaksi terhadap politik pecah belah yang dijalankan Belanda dengan memperkuat solidaritas sosial dan budaya. Ia mengajak rakyat untuk tetap bersatu melawan penjajahan dengan menekankan pentingnya menjaga adat, agama, dan kehormatan. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan pesan moral bahwa Belanda tidak hanya merampas kekayaan Jambi, tetapi juga berusaha menghancurkan tatanan sosial yang menjadi identitas masyarakat. Pesan ini berhasil memperkuat kesadaran kolektif rakyat Jambi sehingga mereka tetap setia mendukung perjuangan Sultan meskipun menghadapi risiko besar (Rosyadi, 2023). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perlawanan Sultan Thaha tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis.

Reaksi Sultan Thaha terhadap pengangkatan sultan-sultan boneka juga menunjukkan ketegasannya dalam mempertahankan legitimasi kekuasaan. Ia menolak secara total keberadaan sultan yang diangkat Belanda dan menganggap mereka sebagai simbol penghinaan terhadap kedaulatan Jambi. Sultan Thaha tidak hanya menolak secara lisan, tetapi juga terus melancarkan serangan terhadap basis-basis kekuasaan sultan boneka. Dengan demikian, ia mengirim pesan yang jelas kepada rakyat bahwa hanya kekuasaan yang sah menurut adat dan hukum yang layak diikuti. Reaksi ini memperkuat posisinya sebagai pemimpin moral dan politik, yang tidak pernah rela melihat kesultanan menjadi alat kepentingan kolonial.

Perlawanan Sultan Thaha berlangsung selama lebih dari empat dekade, menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Selama periode ini, ia terus berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan, tetapi tetap menjaga semangat perjuangan. Belanda berulang kali melancarkan ekspedisi militer untuk menaklukkannya, tetapi gagal menangkap atau mematahkan perlawanan sepenuhnya. Strategi gerilya yang fleksibel dan dukungan rakyat menjadi kunci keberhasilan Sultan Thaha dalam memperpanjang masa perlawanan. Reaksi panjang ini memperlihatkan bahwa perjuangan melawan kolonialisme memerlukan ketahanan mental, kesabaran, dan ketekunan yang tinggi. Sultan Thaha gugur dalam pertempuran pada tahun 1904 di Muara Tebo. Meskipun wafat, ia tidak pernah tertangkap hidup-hidup oleh Belanda, dan hal ini memperkuat citranya sebagai pejuang yang tidak pernah menyerah (Apriliani, R., & Seprina, 2023). Gugurnya Sultan Thaha menjadi penutup dari babak panjang perlawanan Jambi terhadap penetrasi kolonial. Namun, kematiannya bukanlah akhir dari semangat perjuangan, melainkan titik awal bagi generasi berikutnya untuk melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan nasional. Pemerintah Republik Indonesia kemudian menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya dalam mempertahankan kedaulatan bangsa.

Reaksi Sultan Thaha Syaifuddin terhadap penetrasi kolonial Belanda dapat dipahami sebagai kombinasi dari penolakan politik, perlawanan militer, diplomasi, penguatan solidaritas

rakyat, dan keteguhan moral. Sikapnya yang konsisten menolak kontrak politik, menolak sultan boneka, dan terus melawan hingga akhir hayat menjadi simbol keteguhan hati melawan penjajahan. Perjuangan ini juga memberikan pelajaran penting bahwa mempertahankan kedaulatan memerlukan keberanian untuk menolak kompromi yang merugikan serta kesediaan untuk berkorban demi harga diri bangsa. Dengan demikian, reaksi Sultan Thaha bukan hanya bagian dari sejarah Jambi, tetapi juga bagian dari sejarah nasional Indonesia yang membentuk identitas perlawanan terhadap kolonialisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa reaksi Sultan Thaha Syaifuddin terhadap penetrasi kolonial Belanda di Jambi pada periode 1858-1904 merupakan wujud perlawanan yang komprehensif, mencakup penolakan politik, perlawanan militer, strategi diplomasi, serta penguatan solidaritas rakyat. Sikap tegasnya menolak perjanjian kolonial dan pengangkatan sultan boneka menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kedaulatan Kesultanan Jambi. Strategi perang gerilya yang diterapkan di pedalaman menjadi simbol ketangguhan dan keteguhan hati menghadapi kekuatan kolonial yang jauh lebih besar. Perjuangan panjang Sultan Thaha yang berlangsung lebih dari empat dekade bukan hanya mempertahankan kehormatan Jambi, tetapi juga memberi inspirasi bagi gerakan nasional dalam melawan kolonialisme di Nusantara. Dengan wafatnya Sultan Thaha pada tahun 1904, berakhirlah perlawanan besar di Jambi, tetapi semangat perjuangannya tetap hidup sebagai warisan moral dan politik bagi bangsa Indonesia.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan literasi sejarah lokal agar generasi muda mengenal lebih dekat tokoh-tokoh seperti Sultan Thaha Syaifuddin yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan diharapkan dapat mengintegrasikan kisah perjuangan Sultan Thaha dalam kurikulum sejarah, memperbanyak penelitian berbasis arsip, serta mengembangkan situs-situs perjuangan sebagai pusat edukasi publik. Selain itu, perlu dilakukan upaya pelestarian nilai-nilai perjuangan seperti keberanian, keteguhan prinsip, dan semangat persatuan sebagai modal sosial untuk menghadapi tantangan modern, sehingga warisan perjuangan Sultan Thaha tidak hanya dikenang sebagai catatan sejarah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pembangunan karakter dan nasionalisme generasi penerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, R., & Seprina, R. (2023). Perjuangan Sultan Thaha Syaifuddin terhadap kolonial Belanda di Jambi (1858-1904): Studi pengembangan bahan ajar pembelajaran sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 2(2), 104.
- Indonesia, T. N. P. S. (2008). *Sejarah nasional Indonesia jilid 3: Zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia*.
- Junaidi, T. N. (2007). *Mencari jejak sangkala*. Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya Jambi.
- Masjkuri. (1985). *Sultan Thaha Saifuddin*. Jakarta: DEPDIBUD, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Rizka, A., & Seprina, R. (2023). Perjuangan Sultan Thaha Syaifuddin terhadap kolonial Belanda di Jambi (1858-1904): Studi pengembangan bahan ajar pembelajaran sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 2(2), 104.
- Rosyadi, & P. (2023). Strategi Sultan Thaha Syaifuddin dalam melawan penetrasi Belanda di Kesultanan Jambi (1855-1904). *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 13(2), 595.
- Rts, F. S. S. (2022). Kedudukan kaum bangsawan Jambi sebelum dan setelah kemerdekaan.
- Sianipar, I. M. (2022). Analisis kepemimpinan Sultan Thaha Saifuddin dalam perlawanan

terhadap Belanda di Jambi. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 1(1).

Vernanda, E. A., & Zahrah, N. N. (2006). Sultan Thaha Saifuddin: Rancangan buku biografi ilustrasi dalam upaya pengenalan pahlawan untuk generasi muda. *Jurnal Desain*, 11(1).

Yulita, O. (2019). Perjuangan Sultan Thaha Saifuddin dalam menentang kolonial Belanda di Jambi (tinjauan historis 1855-1904 M). *Jurnal Keislaman Dan Peradaban*, 13(2).